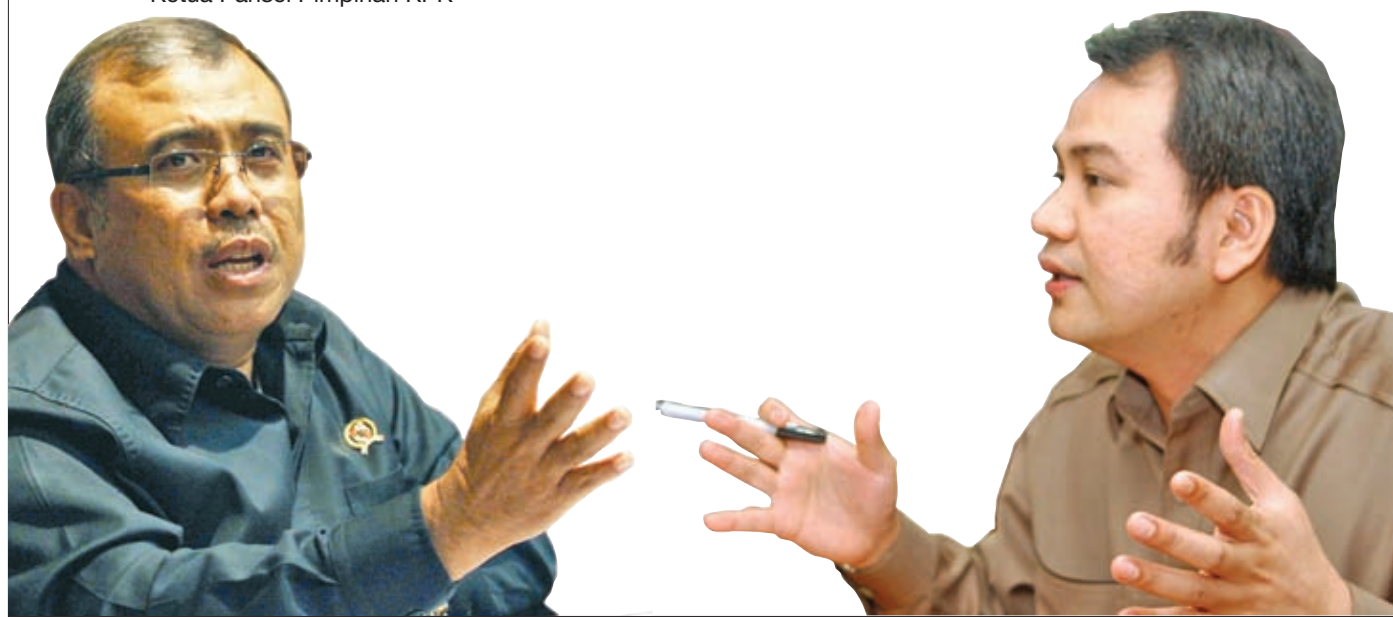


“Itu semua fitnah.”
Patrialis Akbar
 Ketua Pansel Pimpinan KPK

“Jangan terkecoh dengan figur besar.”
Azis Syamsuddin
 Wakil Ketua Komisi III DPR



MI/SUSANTO

MI/AGUNG

Advokat Juniver Girsang Raih Doktor, Cum Laude

ADVOKAT senior Juniver Girsang meraih gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (13/8), dengan predikat *cum laude*. Di hadapan 10 profesor dan dua doktor sebagai tim penguji, Juniver yang dilahirkan di Medan 48 tahun lalu itu menyebutkan disertasinya merupakan bentuk kesetiaan untuk terus-menerus belajar sampai akhir hayat. Karena, dengan belajar, dirinya semakin arif dalam menghadapi kehidupan.

Juniver berhasil mempertahankan disertasi berjudul *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dikembangkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No: 003/PUU-IV/2006*. Putusan itu terkait dengan pengujian UU No 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 ten-



Juniver Girsang
 Advokat senior

tantang Pemberantasan terhadap UU 1945.

Dalam kaitan ini, disertasi Juniver ternyata masih banyak mendapat catatan dari Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja selaku tim penguji. Prof Kom-

ariah meminta agar Juniver tidak terlalu mengagungkan putusan MK, karena putusan MK hanya bersifat asas hukum. Bukan seperti putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat konkret dalam pembuktian suatu tindak pidana.

“Jadi, saudara tidak perlu mengagungkan putusan MK No 3 tahun 2006 itu,” kata Prof Komariah berkali-kali. Tapi, Juniver tetap bertahan. “Bukan berarti saya mengagungkan putusan MK. Putusan MK itu sudah final, telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum,” tegas Juniver. Karena itu, lanjutnya, seharusnya semua pihak termasuk MA harus menghormati dan mematuhi.

Saat menjawab pertanyaan anggota tim penguji lainnya,

Prof I Nyoman Serikat Putradjaja terkait cara menumpas korupsi yang efektif di Indonesia, Juniver menjelaskan, salah satu caranya adalah dengan tidak ada lagi aparat yang memberikan multitafsir terhadap UU Tindak Pidana Korupsi. Termasuk, jangan ada lagi aparat penegak hukum yang ‘bermain’ dalam memberantas korupsi. Dia meyakini apabila hukum ditegakkan dengan niat baik dan profesional, korupsi di Indonesia dapat dicegah.

Dia menegaskan, keadilan dan kepastian hukum akan benar-benar terwujud jika semua aparat penegak hukum bertindak arif dan bijaksana, tanpa harus menafsirkan yang bukan-bukan tentang undang-undang yang berlaku. (Sulaiman Basri/S-4)

Pansel Jangan Ragu Gugurkan Nama Populer

ICW dituding telah melanggar komitmen untuk tidak akan mengumumkan hasil rekam jejak calon pimpinan KPK.

Amahl Sharif Azwar

PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak terpengaruh dengan nama besar sebagian kandidat. Pansel harus memprioritaskan untuk melihat dari segi akurasi dan kemampuan para calon dari segi hukum acara.

“Jangan terkecoh dengan nama figur besar. Yang terpilih harus yang memahami unsur hukum acara,” tukas Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin di Jakarta, kemarin.

Ia menyoroti tiga nama yang populer dari tujuh kandidat yang ada, yaitu mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, dan advokat Bambang Widjojanto.

“Kalau KPK harus hukum acara yang berbicara. Bukan hanya nama besar, tapi juga kualitas,” tandas Azis.

Rekam jejak seluruh kandidat Ketua KPK diinvestigasi secara khusus oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai 3 hingga 15 Agustus 2010.

Hasilnya, menurut peneliti ICW Donal Fariz, seluruh kandidat Ketua KPK terindikasi bermasalah. Ada tiga aspek

yang menjadi acuan dalam investigasi tersebut, yakni, kepemimpinan, integritas, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, ada tiga kandidat yang memiliki masalah terkait dengan ketiga aspek sekaligus.

Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar menganggap tuduhan pansel cenderung memilih nama besar atau calon titipan adalah fitnah. “Itu semua fitnah,” katanya.

Selain itu, ia menyayangkan ICW telah melanggar komitmen untuk tidak akan melempar rilis apa pun kecuali kepada pansel. “Jadi, kalau ada di luar itu bukan resmi,” tandas Patrialis.

Ia menambahkan, sesi wawancara calon Ketua KPK diundur hingga pada 26 Agustus dari jadwal semula 19 Agustus. Tetapi, ia tidak menjelaskan alasan penundaan itu.

Anggota pansel Todung Mulya Lubis mengaku sudah memiliki gambaran dua kandidat yang kira-kira akan lolos. “Tetapi gambaran itu perlu didiskusikan karena gambaran tiap anggota pansel berbeda.”

Seperti diketahui, selain ICW, pansel juga melibatkan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) dalam menelusuri rekam jejak para calon.

Todung menambahkan ketu-

juh calon berkemungkinan akan menjalani tahap wawancara. “Tetapi itu tergantung putusan pansel dari hasil *tracking*,” katanya.

Saat ini masih ada tujuh nama calon pimpinan KPK yang sedang menjalani seleksi rekam jejak. Bagi yang lolos, akan mengikuti seleksi wawancara. Ketujuh nama itu adalah Bambang Widjojanto (advokat), Chaerul Rasyid (purnawirawan polisi), Fachmi (jaksa), Busyro Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial), Jimly Asshiddiqie (mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden), Meli Darsa (advokat), dan I Wayan Sudirta (anggota DPD RI dari Bali).

Cuma tiga

Ketua Mappi Hasril Hertanto menjelaskan, komponen yang digunakan Mappi untuk menelusuri rekam jejak adalah integritas, kepemimpinan, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, serta kemampuan manajerial.

Hasilnya, sambungnya, hanya tiga dari tujuh orang yang layak mengikuti seleksi berikut. “Tetapi masih bisa kita peras lagi menjadi dua orang karena yang satu belum teruji dalam memimpin lembaga publik,” pungkasnya. (EP/* /CC/P-1)

amahl@mediaindonesia.com



PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008

	2009 Rp	2008 Rp		2009 Rp	2008 Rp		2009 Rp	2008 Rp
ASET			KEWAJIBAN DAN EKUITAS			PENDAPATAN USAHA	2.506.356.618,427	2.473.433.750,755
ASET LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			REDUKSI PENDAPATAN	(7.730.679,927)	(16.047.505,628)
Kas dan setara kas	1.502.193.743,499	1.645.425.948,434	Hutang usaha	292.870.549,604	182.560.377,897	PENDAPATAN USAHA BERSIH	2.498.625.938,500	2.457.386.245,127
Investasi jangka pendek	415.204,115	312.169,706	Hutang bagi hasil pendapatan	10.881.737,852	18.320.139,984	BEBAN USAHA	1.674.398.042,009	1.860.527.909,423
Piutang usaha (net)	94.107.741,937	101.137.412,749	Uang untuk diperhitungkan	11.743.105,974	6.163.965,707	LABA USAHA	824.227.896,492	596.858.335,704
Piutang pegawai	2.800.014,866	2.301.967,364	Uang titipan	51.371.097,536	47.970.859,909	PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA	509.514.357,628	716.090.890,150
Piutang lain-lain (net)	8.934.926,779	18.298.336,224	Hutang pajak	105.349.838,357	173.871.311,623	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.333.742.254,120	1.312.949.225,854
Uang muka	44.267.933,732	4.273.964,390	Beban yang masih harus dibayar	124.630.891,429	116.155.823,145	MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(378.366.920,899)	(255.364.896,802)
Pendapatan masih akan diterima	181.150.371,633	74.258.626,147	Hutang jangka panjang jatuh tempo dlm satu tahun	581.252,967	647.613,156	LABA SEBELUM HAK MINORITAS	955.375.333,221	1.057.584.329,052
Persediaan	14.448.150,888	12.882.915,850	Hutang dana pensiun	226.885.364,899	249.796.698,312	HAK MINORITAS	(10.615.447,792)	(10.402.303,669)
Beban dibayar dimuka	34.205.372,651	14.770.993,539	Hutang jangka panjang lainnya	150.759.105,504	113.035.035,234	LABA BERSIH	944.759.885,429	1.047.182.025,383
Pajak dibayar dimuka	9.013.507,582	9.502.710,260	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	975.072.944,123	908.521.824,966			
Penyertaan pengelolaan bersama aset	175.011.090,978	208.336.693,235	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Jumlah Aset Lancar	2.066.548.058,660	2.091.501.737,898	Hutang pengadaan aset tetap	3.190.061,477	2.940.951,044			
ASET TIDAK LANCAR			Kewajiban imbalan kerja	242.748.523,937	207.567.608,150			
Investasi jangka panjang	587.550.236,192	600.603.172,659	Kewajiban pajak tangguhan	185.567.468,945	71.011.522,040			
Aset tetap (Net)	4.161.086.373,732	3.504.325.246,456	Kewajiban jangka panjang lainnya	303.049.047,121	300.319.689,558			
Aset pajak tangguhan	1.393.739,450	1.306.667,276	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	734.555.101,480	581.839.770,792			
Beban ditangguhkan	97.635.308,972	87.691.988,901	Jumlah Kewajiban	1.709.628.045,603	1.490.361.595,758			
Aset lain-lain	127.272.244,359	128.318.253,875	HAK MINORITAS	41.215.440,043	38.653.273,704			
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.974.937.902,705	4.322.245.329,167	EKUITAS					
JUMLAH ASET	7.041.485.961,365	6.413.747.067,065	Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.009.958.000,000	1.009.958.000,000			
			Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya	7.652.976,000	7.652.976,000			
			Modal donasi	26.825.982,300	25.777.539,000			
			Saldo laba	4.246.205.517,419	3.841.343.682,603			
			Jumlah Ekuitas	5.290.642.475,719	4.884.732.197,603			
			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.041.485.961,365	6.413.747.067,065			

CATATAN :

- Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Konsolidasian Tahun 2009 telah diaudit KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.

Jakarta, 18 Agustus 2010

Direksi
 PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)